

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, khususnya kebaruan dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan menjelaskan konsep novel menurut beberapa ahli, kemudian menjelaskan wacana kritis sebagai paradigma atau konsep berpikir, diikuti penjelasan mengenai kekuasaan dari berbagai sumber bacaan. Terkait wacana kritis akan mengerucut pada wacana kritis model van Dijk, sementara konsep mengenai kekuasaan, peneliti berfokus pada konsep-konsep Michel Foucault dan Antoni Gramsci. Terakhir, akan dijelaskan konsep ideologi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Teori menyusun dan merangkaikan pengetahuan yang sudah ada. Sebelum masuk pada spesifikasi penelitian ini, sebaiknya diamati beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dicermati peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai posisi subaltern dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi yang dilakukan oleh Ayatullah Patullah, dkk. (2021: 67—80). Penelitian ini menggunakan perspektif Gayatri C. Spivak.

Penelitian mengenai posisi subaltern dan wacana kolonial yang diterima serta perlawanan-perlawanan yang dilakukan pada masa penjajahan kolonial Belanda, Jepang, dan Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah posisi subaltern dan wacana kolonial yang diterima dalam novel *Orang-Orang Oetimu* adalah bagaimana efek yang diterima langsung oleh kaum subaltern, di mana kaum subaltern mengalami penindasan, kekerasan, ketidakadilan, pelabelan, dan pemerkosaan (2021: 79).

Dominasi kekuasaan tidak hanya dipraktikkan dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga dilanggengkan lewat hegemoni, yang terbahasakan dalam novel seperti menerima bahasa asing, mengganti makanan pokok, dan mengubah mata pencaharian hidup. Namun, kaum subaltern dalam novel *Orang-Orang Oetimu* tidak hanya diam dengan semua itu. Ada juga yang melakukan perlawanan. Dengan demikian, novel ini, dalam penelitian ini hendak menyuarakan perlawanan kaum subaltern.

Hal penting yang membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengkaji novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi, karena peneliti akan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Selain itu jenis teori yang digunakan juga berbeda, dalam penelitian ini menggunakan kajian postkolonialisme Gayatri C. Spivak, sedangkan peneliti akan menggunakan paradigma kekuasaan untuk memerinci novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi.

2. Penelitian terdahulu kedua yang dijadikan pembandingan dilakukan oleh Hermawan Septian Abadi yang mengkaji tentang kekuasaan seksualitas dalam novel menggunakan perspektif analisis wacana kritis Michel Foucault (2017: 167—178). Novel yang didalami dalam penelitian ini ialah novel *Kremil* karya Suparto Brata. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan tiga temuan yaitu, *pertama*, relasi kekuasaan seksualitas dengan praktik ekonomi, rumah tangga (perkawinan), dan tata lingkungan. *Kedua*, relasi kekuasaan seksualitas dengan histerisasi tubuh melalui praktik medis. *Ketiga*, relasi kekuasaan seksualitas dengan pedagogis seksualitas anak.

Dalam penelitian tersebut, novel tidak menjadi prioritas dari peneliti, tetapi hanya menjadi tunggangan untuk menjelaskan teori-teori yang telah disiapkan. Novel hanya menjadi pajangan yang tidak didalami. Peneliti hanya berfokus dan bertele-tele menjelaskan kekuasaan. Perlu dilihat bahwa, penelitian ini meskipun sama-sama mengkaji kekuasaan—atau kekuasaan seksualitas—dan sama-sama menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, tetap saja memiliki perbedaan. Letak perbedaannya ialah novel yang dikaji, kekuasaan yang akan dibahas tidak hanya soal kekuasaan seksualitas semata tetapi akan lebih kompleks, dan pendekatannya meskipun sama tetapi berbeda dalam model, di mana peneliti akan menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga dilakukan oleh Devi Ningsih dan Eggy Andalas. Ningsih dan Andalas (2021) meneliti tentang dinamika sosial masyarakat Timor Timur era unifikasi dengan Indonesia dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi postkolonial dengan menggunakan metode kualitatif. Pembacaan terhadap novel dilakukan menggunakan strategi *contrapuntal* yang diperkenalkan Edward Said.

Temuan para peneliti, era unifikasi dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix Nesi ditandai dengan maraknya tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, praktik kemunafikan para pemuka agama, dan keinginan yang kuat dari masyarakat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia. Karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh era unifikasi dengan Indonesia membuat banyak perubahan dan menimbulkan beberapa bentuk dinamika sosial yang terjadi terhadap masyarakat di Timor Timur. Pengaruh ini mengakibatkan kehidupan masyarakat Timor Timur terpecah-belah. Keterpecahan itu pun memengaruhi aspek ekonomi dan keagamaan masyarakat di Timor Timur.

Jika penelitian ketiga ini dijadikan sebagai pembandingan, maka perbedaannya terletak pada pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, di mana peneliti akan lebih berfokus mengkaji kekuasaan dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix Nesi. Walaupun metode *contrapuntal* hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan, penelitian

mengenai kekuasaan dalam novel yang sama, dilakukan dengan membuat pemetaan tanpa ada hipotesis terlebih dahulu dan tidak mencari hubungan antarvariabel. Selain itu, kekhasan atau kebaruan penelitian yang akan dilakukan adalah metode analisis wacana kritis yang belum pernah digunakan untuk meneliti novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

2.2. Novel

Pembicaraan mengenai novel memiliki cakupan yang cukup luas. Ada sejarah panjang yang turut melatarbelakangi hadirnya novel yang juga diikuti dengan pemberian definisi terhadapnya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang lazimnya berisi cerita dengan garapan tema tertentu yang dihidupi dengan penghadiran tokoh, penokohan, plot/alur, latar tempat dan waktu. Dalam pemahaman demikian Kurnia menyebut novel sebagai suatu dunia yang bermain-main dalam batas antara imajinasi dan realitas (2016: 24).

Sehubungan dengan itu, Goldmann dalam Faruk (2015: 90) mendefinisikan novel sebagai cerita tentang suatu pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik, yang dilakukan seorang hero yang problematik dalam sebuah dunia yang juga terdegradasi. Yang dimaksud dengan nilai-nilai yang otentik itu adalah nilai-nilai yang mengorganisasi dunia novel secara keseluruhan walaupun hanya secara

implisit. Goldmann menambahkan bahwa nilai-nilai itu hanya ada dalam kesadaran si novelis, tidak dalam karakter-karakter sadar atau realitas yang konkret. Karena Goldmann sebenarnya mengkritik pemikiran Lukacs yang menyatakan bahwa novel masih bermain-main dalam batas totalitas dalam dunia yang sudah tidak lagi mengandung hal itu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang otentik itu adalah totalitas kehidupan.

Kemudian, penjelasan degradasi dalam pemikiran Goldmann sesungguhnya mengarah pada suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya perpecahan yang tidak terjembatani antara sang hero dengan dunia. Sebab itu, degradasi menggambarkan sekaligus oposisi konstitutif antara dasar dari perpecahan yang tidak terjembatani itu dengan suatu komunitas yang cocok—yang memungkinkan eksistensi bentuk epik—demi suatu totalitas (Faruk, 2015: 91).

Atas dasar definisi itulah Goldmann mengategorikan novel ke dalam tiga jenis (Faruk, 2015: 92), yaitu: *pertama*, novel idealisme abstrak, yang diwakili oleh *Don Quixote*, di mana sang *hero* penuh optimisme dalam petualangan tanpa menyadari kompleksitas dunia. *Kedua*, novel psikologis, yang diwakili oleh L. ‘*Education Sentimentale*’-nya Goethe, di mana sang *hero* cenderung pasif karena kekuasaan kesadarannya tidak tertampung oleh dunia konvensi. *Ketiga*, novel pendidikan, yang diwakili oleh *Wilhelm Meister*, di mana sang *hero* sudah melepaskan pencariannya akan nilai-nilai yang otentik, tetapi menolak dunia.

Reduksi nilai-nilai otentik atau kelenyapannya sebagai realitas yang berwujud itu disebut Goldmann sebagai “mediatisasi”. Dengan konsep inilah,

menurut Goldmann, homologi antara bentuk novel dengan masyarakat yang melahirkannya dapat dipahami. Namun ketika membahas novel baru terapan ketiga, Goldmann membuka penjelasannya dengan dua anggapan dasar tentang novel. *Pertama*, novel baru cenderung memodifikasi kesatuan hubungan antara karakter dengan objek ke arah proses lenyapnya karakter dan semakin kuatnya otonomi objek. *Kedua*, bentuk novel berhubungan secara lebih langsung dengan struktur pertukaran dan produksi pasar.

Dalam pada itu, Kundera dalam bukunya *The Art of the Novel*, mengungkapkan bahwa tugas seorang pengarang/novelis adalah mengganggu para pembacanya agar melihat dunia sebagai sebuah pertanyaan besar melalui novelnya (Kurnia, 2016: 25). Karena itu, Kundera menunjukkan bahwa ada tiga halangan yang memiliki kuasa untuk memaksa pembaca kehilangan kontak dengan kekuatan revolusioner novel. *Pertama*, *agelaste*, kaum fanatik berpandangan sempit yang tak menyukai lelucon. *Agelaste* mengancam seni novel karena tak mampu menerima kebenaran yang terbuka. Maksudnya, menolak kebenaran sebagai sebuah pencarian dan mengharamkan pertanyaan akibat kegandrungan pada taklid buta. *Kedua*, kelompok yang menerima ide tanpa berpikir. Kelompok ini adalah virus yang meracuni kebutuhan dasar manusia akan pembebasan, mengolah nalar, bertanya, dan berimajinasi. *Ketiga*, *kitsch* (*minor art*), yang mendikte gaya hidup yang mengharuskan setiap orang mengikutinya agar menjadi normal dan tidak aneh. Akibatnya, manusia kehilangan kebutuhan akan individualitas, privasi, dan orisinalitas.

Mengenai hubungan antara novel dan struktur sosial masyarakat, Faruk (2015: 109—119) memetakannya dalam empat hubungan. *Pertama*, hubungan kelembagaan. Dalam hubungan ini, aturan-aturan, konvensi, atau kode-kode kesusatraan dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang mapan. Bertepatan dengan itu, suatu pola perilaku yang kemapanannya telah diterima, dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat yang di dalamnya konvensi-konvensi, aturan-aturan itu hidup tanpa memedulikan bentuk maupun isinya karena ia bersifat arbitrer dalam hubungan dengan substansi di luar dirinya. *Kedua*, hubungan pemodelan. Lotman menyebut novel sebagai sistem pemodelan kedua. Artinya, karya sastra novel merupakan sistem pemodelan yang ditumpangkan pada sistem pemodelan tingkat pertama, yakni bahasa. Pemodelan merupakan suatu wacana yang memodelkan semesta yang tidak terbatas dalam satu semesta imajiner yang terbatas.

Ketiga, hubungan pembentukan, yang berarti hubungan antara novel sebagai karya sastra dengan pandangan dunia atau struktur sosial yang terjadi akibat adanya konvensi khusus yang digunakan karya sastra dalam penggarapan atau pengekspresian pandangan dunia atau struktur sosial tersebut. *Keempat*, hubungan pembatasan. Menurut Wolff, konvensi-konvensi produksi novel sebagai karya sastra yang estetik, tidak mengizinkan pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau peristiwa-peristiwa tertentu di dalam teks. Pengungkapan pembatasan-pembatasan konvensional penting karena akan menyingkap ideologi yang terdapat di balik teks tersebut. Karena itu, menyitir Emha Ainun Nadjib,

konvensi sastra Indonesia dikuasai oleh konvensi “bisu” karena melarang masuk berbagai kenyataan sosial dan politik ke dalam novel sebagai suatu karya sastra.

2.2.1 Novel Sebagai Teks

Ilmu sastra sebenarnya menjadi cabang dari ilmu yang mempelajari teks secara umum. Karena itu, novel sebagai karya sastra merupakan salah satu jenis dari beraneka teks yang bisa ditemukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, teks adalah ungkapan yang memiliki kesatuan pragmatik, sintaksis, dan semantik (Faruk, 2015: 41). Kesatuan pragmatik berkaitan dengan konteks sosial penggunaan bahasa, sintaksis memiliki relevansi dengan keruntutan, dan kesatuan semantik berkaitan dengan tema global yang melingkupi semua unsur dalam teks.

Novel sebagai teks bersandar pada berbagai referensi. Pradotokusumo (2009: 56) mengklasifikasikan teks ke dalam tiga bagian, yakni teks referensi, teks ekspresif, dan teks persuasif. Artinya novel sebagai teks referensi berfungsi menyatakan sesuatu yang mengacu kepada konteks, yakni dunia nyata dan dunia yang mungkin ada. Novel sebagai teks ekspresif bertugas mengungkapkan perasaan, isi hati, dan kegelisahan dalam diri seorang pengarang. Novel sebagai teks persuasif digunakan untuk memengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan pengarang.

Dalam pada itu, Fiske dalam Eriyanto (2011: 87) mengemukakan bahwa makna tidak intrinsik dalam teks itu sendiri. Gagasan ini berarti seseorang yang membaca suatu teks novel tidak menemukan makna dalam teks novel itu, karena yang ia temukan dan ia hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pengarang maupun pembaca. Artinya, pembaca dan teks secara simultan memiliki andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan. Implikasinya, hubungan itu menempatkan seseorang sebagai satu bagian dari relasinya dengan sistem tata nilai yang lebih besar di mana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja dalam dan lewat teks.

Teks yang telah menjadi kendaraan ideologi menjadi sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, ide palsu atau kesadaran palsu, dan produksi makna (Eriyanto, 2011: 87—92). Karena itu, dapat dikatakan bahwa paradigma ideologi ditandai dengan sebuah pemahaman bahwa semua teks mempunyai dimensi sosial politik dan tidak dapat dimengerti apabila tidak menyertakan dimensi konteks sosialnya. Gagasan tersebut kemudian diradikalkan van Dijk dengan suatu preposisi bahwa penelitian atas wacana tidak cukup apabila hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, sebab teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati (Eriyanto, 2011: 221). Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi sehingga memperoleh suatu pengetahuan terkait mengapa teks dikemas sedemikian rupa.

Dapat dikatakan bahwa novel sebagai teks dalam kaitannya dengan ideologi sebagai basis utama kajian analisis wacana kritis dipahami dalam tiga dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk mengartikulasikan tema tertentu di dalam novel. Dalam dimensi kognisi sosial, didalami bagaimana proses produksi teks novel yang melibatkan kognisi individu pengarang. Sementara dalam dimensi konteks sosial, dipelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat, terutama pengetahuan akan tema tertentu.

2.3 Wacana Kritis

Teori wacana mengandaikan bahwa proses sosial politik adalah praktik wacana. Wacana yang dimaksud adalah artikulasi, yang dipahami sebagai kegiatan/praktik apapun yang membangun relasi di antara elemen, termasuk identitas, yang merupakan hasil dari modifikasi kegiatan berwacana. Senada dengan itu, Hajer dalam Savirani (2017: 113) memahami wacana sebagai rakitan ide, konsep, dan kategori yang diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi dalam praktik yang spesifik, dan melalui praktik tersebut makna realitas sosial dan realitas fisik dibangun. Wacana tidak bersifat tetap, sebab wacana bersifat relasional dan tidak pernah dapat membentuk dirinya sendiri secara utuh.

Seperti yang telah disinggung pada latar belakang bahwa wacana kritis merupakan bentukkan tertinggi dari wacana. Dalam bagian ini, perlu dibuat sedikit pembedaan antara wacana kritis sebagai teori dan wacana kritis sebagai

model analisis (bdk. Eriyanto, 2011: 20). Meskipun keduanya dalam proses penalaran akan bertemu dan mustahil untuk dipisahkan, pada bagian ini akan dijelaskan wacana kritis sebagai suatu teori atau paradigma.

Pada dasarnya, analisis wacana diklasifikasikan dalam kategori paradigma kritis. Paradigma ini mempunyai pandangan bahwa sebuah wacana mesti dipahami sebagai keseluruhan proses produksi dan struktur sosial. Pandangan kritis jika ditelusuri dipengaruhi oleh ide dan gagasan Marx yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem kelas, di mana masyarakat didominasi oleh kelompok elite. Pada titik ini, wacana adalah alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari memarginalkan kelompok yang tidak dominan. Karena itu, Hall dalam Eriyanto (2011: 23) mengemukakan bahwa pertanyaan utama paradigma kritis adalah adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi.

Dari pikiran-pikiran Marx kemudian lahir mazhab Frankfurt yang juga banyak memperhatikan aspek ekonomi politik dalam proses penyebaran pesan. Teori kritis mengarah kepada emansipasi dalam kerangka pembebasan terhadap kultur dan ideologi dominan (Fansuri, 2015: 67). Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Horkheimer dalam Eriyanto (2011: 24) bahwa teori kritis dilihat sebagai teori yang emansipatoris karena selalu curiga dan mempertanyakan dengan kritis berbagai dominasi yang mencengkeram masyarakat. Kaitannya dengan wacana ialah—dalam pemikiran Frankfurt—wacana menjadi sarana

untuk meneguhkan kelompok dominan sekaligus memojokkan kelompok minoritas. Pada titik ini, teori Gramsci tentang hegemoni layak dikedepankan.

Antonio Gramsci membangun sebuah teori yang menekankan bagaimana dominasi kelompok berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai berlangsung dalam proses yang damai tanpa tindakan kekerasan (Eriyanto, 2011: 103). Gramsci berpendapat bahwa kekuasaan dan dominasi kaum kapitalis tidak hanya berlangsung melalui dimensi material dan sarana ekonomi (relasi produksi), tetapi melalui hegemoni. Jika kekuasaan biasanya menggunakan kekerasan dan paksaan untuk mengikuti aturan, hegemoni justru meliputi perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” secara sukarela. Seperti yang dikatakan William, hegemoni bekerja melalui ideologi dan budaya. Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan, salah satunya ialah menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, dianggap benar, dan menyalahkan wacana lainnya. Wacana disebarkan dan meresap dalam benak khalayak, kemudian mendarah-daging.

Gramsci ketika membahas negara memperluas konsep kekuasaan dengan menemukan sumbangan dari aparatus privat hegemoni yang bekerja melalui arena masyarakat sipil untuk melanggengkan dan mereproduksi hierarki kekuasaan dan penguasaan suatu kelas sosial di atas kelas sosial yang lainnya (Kusman, 2017: 153). Hemat Gramsci, mekanisme kerja institusi negara dalam merawat dan mereproduksi kekuasaan kelas sosial dominan suatu masyarakat bekerja melalui praktik dominasi/koersi yang berlangsung di arena masyarakat

politik yang dikontrol oleh birokrasi, militer dan polisi, dan yang terutama melalui penyebaran dan internalisasi ideologi yang dilakukan oleh beragam organisasi, seperti perguruan tinggi, sekolah, gereja, serikat pekerja, asosiasi profesional, dan media massa.

Dalam ruang masyarakat sipil tempat beroperasinya praktik hegemoni itulah pengarang secara organik terikat dengan kepentingan kelas sosial yang dibelanya. Pengarang bekerja sebagai agen pemberi legitimasi dari tatanan ekonomi-politik yang eksis maupun sebagai artikulator pengetahuan kaum marjinal yang ditundukkan oleh proyek kekuasaan kelas atas. Pengarang menjadi pihak kekuatan sosial dominan yang berkiprah sebagai deputy kelompok dominan yang menjalankan hegemoni dan kepemimpinan.

Tidak hanya Gramsci, bagi Foucault, wacana tidak dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, melainkan sesuatu yang memproduksi yang lain (Eriyanto, 2011: 65). Wacana dapat dideteksi karena suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk secara sistematis dalam suatu konteks tertentu sebagai upaya memengaruhi cara berpikir dan cara bertindak khalayak. Dengan demikian, konstruksi dalam masyarakat adalah produk dari hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Karena itu, pemahaman terhadap wacana yang dikembangkan Foucault dipakai sebagai kunci untuk memahami praktik-praktik sosial—praktik-praktik diskursif dalam masyarakat atau lembaga ataupun hubungan antara unsur-unsur komunikasi (bdk Fansuri, 2015: 24).

Hemat Foucault dalam Eriyanto (2011: 66) kekuasaan selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kekuasaan. Artinya, penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan ungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Konsep Foucault ini berimplikasi pada praktik untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan, sebab setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Di sini wacana menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa.

Selain itu, menurut Foucault, kekuasaan tidak bekerja lewat penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Sejalan dengan itu Bertens mengungkapkan bahwa kekuasaan mereproduksi realitas, mereproduksi lingkup objek-objek, dan ritus-ritus kebenaran. Dapat dikatakan publik tidak dikontrol dan disiplinkan lewat kekuasaan yang sifatnya fisik, melainkan melalui wacana. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan berlangsung. Simbol yang dihasilkan wacana, antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, dan lainnya tidak hanya menghasilkan sesuatu tetapi turut menghasilkan perilaku, nilai-nilai dan ideologi (Suryakusuma, 1991: 8). Melalui wacana, individu tidak hanya didefinisikan tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan disiplinkan.

Dalam pada itu, terkait terbentuknya bangunan wacana, studi wacana kritis tidak sekadar melihat pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari wacana (Eriyanto, 2011: 73). Realitas dalam kaitannya dengan wacana, dipahami sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana, sebab realitas itu sendiri tidak bisa didefinisikan apabila manusia tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif. Struktur diskursif ditandai oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Dengan kata lain, struktur diskursif adalah bangunan besar yang secara sistematis berbentuk sebuah episteme sebagai suatu keseluruhan melalui mana kebudayaan berpikir.

Terdapat aneka wacana yang beredar dalam masyarakat dan berbeda satu sama lain. Di titik ini, bagi Aditjondro dalam Eriyanto (2011: 77) kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana lainnya akan terpinggirkan dan terpendam. Ada dua konsekuensi dari distingsi tersebut; *Pertama*, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami. *Kedua*, struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran.

Proses terpinggirkannya wacana lain juga berkonsekuensi pada alpanya kesempatan bagi khalayak untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan beragam dari suatu teks, dan menunjukkan praktik ideologi. Acap kali seseorang, suatu kelompok, suatu gagasan, kegiatan termarginalkan dalam penciptaan wacana-wacana. Dengan demikian, berkat bantuan wacana kritis, dapat dilacak

bagaimana sebuah wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di antara pihak-pihak yang dilibatkan dalam teks, seperti negara dan masyarakat, atau kelas-kelas sosial yang ada, serta perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas yang direpresentasikan dalam praktik sosial. Sebab, wacana dapat disebut sebagai praktik dari praktik lainnya (Fansuri, 2015: 21).

Secara keseluruhan karakteristik wacana kritis (Eriyanto, 2011: 8—13) dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah *action* atau tindakan yang mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. *Kedua*, konteks. Wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. *Ketiga*, historis. Wacana ditempatkan dalam konteks sejarah dalam kurun waktu tertentu. *Keempat*, kekuasaan. Wacana kritis mempertimbangkan kekuasaan dalam analisisnya, sebab setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks tidak dipahami sebagai suatu bentuk yang alamiah dan netral, melainkan merupakan kemasam pertarungan kekuasaan. *Kelima*, ideologi. Wacana kritis tidak menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi meneropong bagaimana ideologi bekerja dalam wacana, terutama bagaimana legitimasi kelompok dominan dalam mengontrol kesadaran kelompok yang tidak dominan.

2.3.1 Wacana Kritis Menurut van Dijk

Van Dijk dalam Littlejohn (2009: 69) menjelaskan bahwa analisis wacana kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang memunculkan rangkaian penekanan tersebut tanpa memisahkan komunikasi dari faktor lain pada keseluruhan sistem kekuatan yang bersifat menekan.

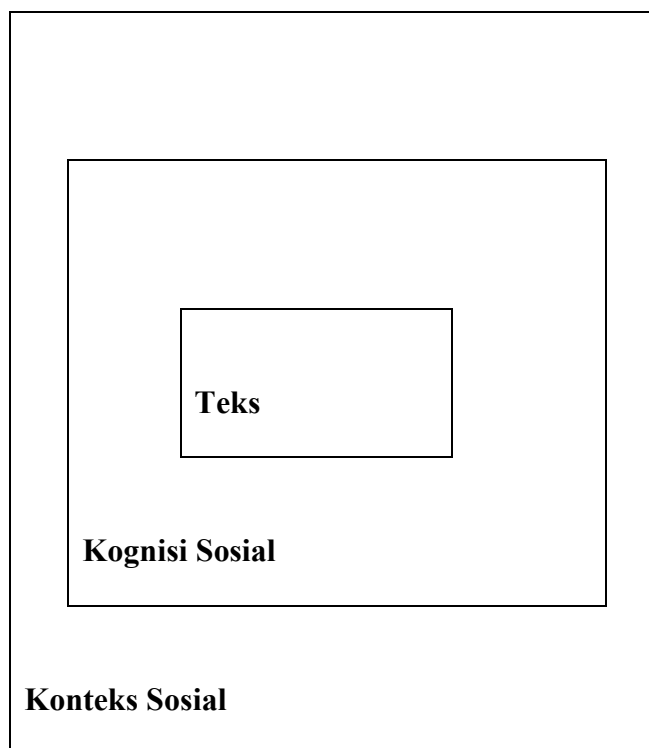
Selain itu, van Dijk dalam Eriyanto (2011: 221) menjelaskan bahwa penelitian atas wacana tidak cukup kalau hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, sebab teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang mesti juga diamati. Artinya analisis wacana kritis harus melihat bagaimana suatu teks diproduksi sehingga pembaca memperoleh pemahaman mengapa sebuah teks bisa dikemas sedemikian rupa.

Model analisis wacana kritis yang sering disebut “kognisi sosial” ini memahami teks bukan sebagai sesuatu yang jatuh dari langit, bukan juga suatu ruang hampa yang mandiri, tetapi dibentuk dalam suatu praktik diskursus atau suatu praktik wacana. Dengan demikian, kognisi sosial mempunyai dua arti. Di satu sisi, menunjukkan bagaimana proses teks novel tersebut diproduksi oleh penulisnya, di sisi lain, ia mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai masyarakat menyebar dan meresap dalam kognisi penulis—struktur sosial, dominasi, kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat—sehingga digunakan dalam membuat teks novel.

Wacana oleh van Dijk mempunyai tiga dimensi/bangunan, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk ialah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Model analisis wacana kritis van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Analisis Wacana Kritis van Dijk



(Sumber: bdk. Eriyanto, 2011: 225)

a. Teks

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur teks yang terdiri atas beberapa tingkatan yang saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, struktur makro yang merupakan makna global/umum

dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat tema atau topik yang diajukan dalam teks novel. *Kedua*, superstruktur, yang bertalian dengan kerangka suatu teks dan keutuhan susunan bagian-bagian teks. *Ketiga*, struktur mikro, yang merupakan pemaknaan wacana dilihat dari bagian kecil suatu teks, yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar (Eriyanto, 2011:226). Jika digambarkan, maka struktur teks terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Struktur Teks Menurut van Dijk

Struktur Makro Makna global dari topik yang diangkat dalam teks novel
Superstruktur Kerangka teks; bab-bab dalam novel
Struktur Mikro Makna lokal dari teks novel yang diamati dari diksi, kalimat, dan gaya yang dipakai penulis dalam teks novel

(Sumber: bdk. Eriyanto, 2011: 227)

b. Kognisi Sosial

Kognisi sosial berkaitan dengan bagaimana suatu teks diproduksi. Dalam kerangka analisis van Dijk, perlu ada penelitian mengenai kognisi

sosial yang tak lain adalah kesadaran mental pengarang yang membentuk teks novel. Pendekatan kognisi sosial didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak memiliki makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa. Dalam hal ini, proses kesadaran mental para pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian atas representasi kognisi dan strategi penulis/pengarang dalam memproduksi novel (Eriyanto 2011: 260). Teks novel dipahami sebagai suatu produk yang dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu dari pengarang yang didapatkan dari kehidupannya.

Van Dijk menjelaskan proses pemahaman terhadap suatu peristiwa didasarkan pada skema, atau yang juga disebut model. Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental yang mencakup bagaimana pengarang memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa. Skema mengindikasikan bahwa pengarang menggunakan struktur mental untuk menyeleksi dan memproses informasi yang datang dari lingkungan. Demikian, skema sangat ditentukan oleh pengalaman dan sosialisasi.

Selain itu, skema juga menggambarkan bagaimana pengarang mengaplikasikan informasi yang tersimpan dalam memorinya dan bagaimana integrasinya dengan informasi baru yang menggambarkan bagaimana peristiwa dipahami, ditafsirkan, dan dimasukkan sebagai bagian dari pengetahuan pengarang mengenai suatu realitas. Dengan cara tersebut, peristiwa yang kompleks dapat disederhanakan dan dikohersikan sehingga

mempunyai arti yang spesifik. Oleh karena itu, menurut van Dijk, analisis wacana harus menyertakan bagaimana reproduksi kepercayaan yang menjadi landasan bagaimana pengarang menciptakan suatu teks novel. Ada beberapa skema/model yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Skema Diri Pengarang Menurut van Dijk

Skema Person (<i>Person Schemas</i>). Skema ini menggambarkan bagaimana seorang penulis/pengarang mengilustrasikan caranya memandang orang lain
Skema Diri (<i>Self Schemas</i>). Skema ini berkaitan dengan bagaimana penulis/pengarang memandang dan memahami dirinya sendiri
Skema Peran (<i>Role Schemas</i>). Skema ini berhubungan dengan bagaimana penulis/pengarang menggambarkan peranan dan posisi yang ditempatinya dalam masyarakat
Skema Peristiwa (<i>Event Schemas</i>). Skema ini yang paling sering dipakai, sebab tiap hari penulis/pengarang selalu melihat, mendengar dan merasakan peristiwa yang lalu-lalang. Setiap peristiwa selalu ditafsirkan dan dimaknai dalam skema tertentu

(Sumber: bdk. Eriyanto, 2011: 262&263)

c. Konteks Sosial (Analisis Sosial)

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah konteks sosial atau analisis sosial. Wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat sehingga untuk meneliti teks, perlu juga dilakukan analisis intertekstual dengan mendalami bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Bagi van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat, terdapat dua poin yang penting yakni kekuasaan dan akses. Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan satu kelompok mengontrol kelompok lain (Eriyanto, 2011: 272). Kekuasaan di sini berkaitan erat dengan dominasi atau pemberian akses khusus kepada suatu kelompok dan meniadakan kelompok lain. Selain itu kekuasaan juga terkait dengan proses produksi teks lewat legitimasi yang termanifestasi dalam bentuk kontrol pikiran, yang kemudian membentuk kesadaran dan konsensus. Sementara akses berhubungan dengan kesempatan untuk mengetahui dan mengakses pengetahuan yang dalam banyak hal sering dihalang-halangi, disempitkan, dan juga pembedaan perlakuan yang semuanya berkaitan juga dengan permainan kekuasaan.

2.4 Kekuasaan

Kekuasaan tidak hanya menjadi bahasan dalam perdebatan ilmiah, tetapi juga dapat dibicarakan dalam sastra, seperti puisi, cerpen, drama, dan novel. Pada penelitian ini, peneliti akan membahas kekuasaan dalam novel. Kekuasaan menjadi sebuah kajian yang terus diperdebatkan dari dekade ke dekade. Definisi kekuasaan di tangan para ahli terus mengalami pembaruan sesuai dengan pendekatan dan konteks kajian. Konsep kekuasaan berkembang karena perdebatan-perdebatan ilmiah para ahli. Kekuasaan pun menjadi kompleks. Berikut ini akan dijelaskan konsep kekuasaan menurut beberapa ahli yang saling mengkritik dan memperbaharui pemahaman dalam memaknai kekuasaan.

Dowding dalam Hutagalung (2004: 2) menyatakan bahwa ada dua konsep mengenai kuasa (*power*), yakni "*power to*" dan "*power over*". Karena itu, kurang tepat apabila manusia sekadar menyatakan "Aktor A memiliki kekuasaan". Preposisi itu akan menjadi abstrak. Konsep "*power to*" (kuasa untuk) merujuk pada tindakan sebagaimana apa yang bisa dilakukan Aktor A dengan kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan konsepsi "*power over*" (kuasa atas) yang jika dibahasakan, Aktor A memiliki kekuasaan atas Aktor B untuk membuat Aktor B melakukan X. konsep "*power to*" lazimnya dianggap sebagai konsep paling dasar dalam penggunaan terminologi kekuasaan.

Konsep "*power over*" dan "*power to*" dapat diilustrasikan sebagai "*outcome power*", yang dihasilkan oleh penggunaan kekuasaan karena kekuasaan itu membawakan hasil-hasil tertentu, dan "*social power*", kekuasaan dalam

hubungan sosial. “*Outcome power*” disebabkan karena kekuasaan yang membawa hasil-hasil tertentu, sementara “*socialpower*” disebabkan oleh perlunya keterlibatan hubungan sosial antara dua aktor atau dua subjek. Definisi dua konsep tersebut digambarkan Dowding dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Konsep Kekuasaan Dowding

<i>Outcome power</i>	Kemampuan dari aktor/subjek untuk membawa atau membantu menghasilkan sesuatu (<i>outcomes</i>)
<i>Social power</i>	Kemampuan dari aktor/subjek secara deliberatif mengubah struktur insentif dari aktor atau aktor-aktor lainnya untuk membawa serta atau membantu menghasilkan sesuatu

(Sumber: Hutagalung, 2004: 3)

Di sisi lain, dalam teropong Gramsci, hubungan antara A dan B bisa berupa hubungan dominasi langsung atau bisa juga merupakan hubungan yang hegemonik. Perbedaanya terletak pada bagaimana praktik itu dijalankan. Penjelasan ini membuka pemahaman mengenai *power relation* atau hubungan kuasa secara teoretis.

Salah satu teori kekuasaan yang cukup terkenal diajukan Steven Lukes dalam karyanya *Power: A Radical View* (1974). Dalam karyanya, Lukes menawarkan konsepsi tiga dimensi perihal kekuasaan (*three dimensional conception of power*) sebagai kritik atas konsep kekuasaan kaum *behaviouralist*,

sekaligus menawarkan analisa baru yang lebih memadai dalam memahami kekuasaan (Hutagalung, 2004: 3). Lukes mengkritik kekuasaan satu dimensi (*one dimensional conception of power*) dari Roberth Dahl, konsepsi dua wajah kekuasaan (*two faces of power*) dari Bachrach dan Baratz yang disebut Lukes sebagai konsepsi dua dimensi tentang kekuasaan (*two dimensional conception of power*).

Menurut Dahl, kekuasaan adalah usaha yang berjalan baik dari A untuk memerintah B melakukan sesuatu yang bahkan tidak dikehendaki B. Lukes menilai analisis Dahl terhadap distribusi kekuasaan berfokus pada perilaku dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu isu, di mana terdapat konflik kepentingan subjektif yang dapat diobservasi, dilihat sebagai preferensi kebijakan, yang diperlihatkan oleh partisipasi politik. Dalam pandangan Bachrach dan Baratz, kekuasaan juga berlangsung pada saat A mencurahkan seluruh energinya untuk menciptakan atau memperkuat nilai-nilai sosial dan politik, serta praktik-praktik institusional yang membatasi wilayah proses politik menuju pertimbangan publik terhadap isu-isu yang secara relatif tidak akan merusak A. Karena itu, kekuasaan mempunyai dua wajah, yaitu hal yang berhubungan dengan pembuatan keputusan (*decision making*) dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembuatan keputusan (*nondecision making*).

Lukes menilai Bachrach dan Baratz gagal sebagaimana Dahl dalam melihat relasi kekuasaan (Hutagalung, 2004: 3): *Pertama*, konsepsi kekuasaan tidak pernah beranjak dengan tetap berfokus pada perilaku aktual sebagai sumber

kekuasaan. *Kedua*, kegagalan Bachrach dan Baratz dalam menjelaskan variabel-variabel yang tak dapat diobservasi dalam menghasilkan *political outcome*. *Ketiga*, Bachrach dan Baratz hanya melihat bagaimana kekuasaan secara ilusif menciptakan preferensi sosial dalam masyarakat, sebab penekanan kedua orang ini yang dititikberatkan pada “*events*” sebagai lokasi utama kekuasaan. Dengan kata lain, Lukes hendak mengatakan bahwa analisis atas kekuasaan tidak hanya berfokus pada perilaku aktor dalam konteks otoritas formal dan dinamika aktual dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mesti melihat kompleksitas dan arena yang lebih luas. Lukes menyimpulkan bahwa kekuasaan bekerja ketika keinginan-keinginan diproduksi oleh sebuah sistem yang berlawanan dengan keinginan B yang sebenarnya, sehingga yang paling utama dan paling tersembunyi dari kekuasaan adalah ideologi dominan sebagai bentuk produksi mental dalam masyarakat. Kekuasaan adalah seperangkat preferensi yang menentukan suatu bentuk, dan ideologi dominan.

Berbeda dengan Lukes yang masih melihat otonomi relatif aktor dalam menjalankan kekuasaan, Parsons dan Poulantzas melihat kekuasaan dalam pandangan strukturalis. Kekuasaan bagi Parson pada dasarnya memiliki dimensi distributif dan dimensi generatif (Mas’oed, 2003: 179). Parsons tidak memahami kekuasaan dalam istilah hubungan di antara agen-agen sosial—sebagai individu-individu, kelompok-kelompok, atau negara-negara—tetapi sebagai bagian dari sistem-sistem sosial. Kuasa berarti memiliki kontrol atas hasil atau *output* (Hutagalung, 2004: 5). Teoretisi Marxis, Poulantzas, juga memahami kekuasaan

dalam cara pandang sistemik. Poulantzas mendefinisikan kekuasaan sebagai kapasitas sebuah kelas sosial untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu secara objektif. Kekuasaan tidak menempati tingkatan-tingkatan struktur sehingga kelas capital memiliki kekuasaan/kekuatan untuk menopang dan menjaga aturan-aturannya yang berkaitan dengan posisinya dalam cara produksi kapitalisme modern.

Dari penjelasan awal tentang kekuasaan dari beberapa ahli, maka bisa dijadikan sebagaiintroduksi untuk masuk pada penjelasan terkait kekuasaan dalam terang Foucault.

2.4.1 Kekuasaan Menurut Foucault

Kekuasaan dalam terang pemikiran Foucault, bagi Dosi (2012: 23—35) dapat dipahami sebagai berikut:

1. Kuasa Adalah Relasi

Bagi Foucault, kekuasaan tidak seperti yang dijabarkan para ahli sebelumnya, yang cenderung melihat kekuasaan sebagai kemampuan memengaruhi sehingga sering kali diidentikkan dengan tindakan represif, koersif, dan opresif. Pertanyaan tentang kekuasaan, bagi Foucault, bersifat sangat sekunder dan mengabaikan pertanyaan soal bagaimana kuasa itu diproduksi dan dilaksanakan. Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Foucault menjelaskan jadwal dalam penjara sebagai sebagai sebuah indikasi dari pendisiplinan

(*disciplinary power*), yang menjadikan kekuasaan memiliki beberapa dimensi (Dosi, 2012: 24): *Pertama*, memiliki kaitan dengan regulasi teknologi, *monitoring*, dan pengawasan/penjagaan. *Kedua*, cenderung untuk dioperasikan secara terus-menerus berdasarkan perubahan kebiasaan cara berpikir dan berperilaku, termasuk teknik-teknik pelatihan kerja tubuh. *Ketiga*, orientasinya lebih rasional daripada ritual. *Keempat*, cenderung mengambil tempat di dalam institusi-institusi yang spesifik seperti penjara, sekolah, dan barak-barak militer.

Karena itu, hemat Foucault, kekuasaan menjadi relasi yang kompleks dan mengandung relasi yang selalu berubah-ubah. Dengan kata lain, kekuasaan dipraktikkan dalam ruang lingkup tertentu yang terdapat banyak posisi dan saling berelasi satu sama lain. Kuasa adalah sebuah nama yang dikenakan untuk suatu situasi strategis demi perubahan yang kompleks dalam suatu masyarakat (Dosi, 2012: 26). Karena itu kekuasaan menyebar dan bekerja mengendalikan banyak orang, komunitas, kelompok kepentingan, dan sifatnya menjadi produktif—tidak lagi represif—yang memiliki kekuatan menormalisasikan hubungan-hubungan masyarakat.

2. Kuasa Bukanlah Milik melainkan Strategi

Dalam paradigma liberal, kekuasaan adalah hak yang dimiliki, ditransfer, atau dihilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya seperti komoditi. Paham marxis juga tidak jauh berbeda. Kekuasaan dilihat dari peran untuk memantapkan hubungan produksi dan dominasi kelas pemodal terhadap kelas

proletar (Dosi, 2012; 27). Karena itu, Foucault melihat bahwa dalam perspektif liberal dan marxis, kekuasaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, atau kelas, di mana terdapat dua pihak yang saling bertentangan yakni pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Foucault menyebut cara pandang tersebut sebagai ekonomisme dalam teori kekuasaan. Sementara menurut Foucault, kekuasaan bukanlah benda, entitas, hak milik, atau komoditas yang terberi, dipertukarkan, dan ditemukan lagi, melainkan dilaksanakan dalam suatu hubungan kekuatan. Sebab dalam setiap hubungan manusia terkandung dimensi kekuasaan. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan hanya bisa dialami melalui praktik yang terjadi dalam suatu relasi sosial. Dengan kata lain, kekuasaan dilakukan melalui sistem organisasi tertentu yang melibatkan pelbagai elemen sosial, hukum, dan sistem sosial itu sendiri.

3. Kekuasaan Tidak Dapat Dilokalisasi tetapi Terdapat di Mana-Mana

Pandangan Foucault ini sesungguhnya adalah kritik terhadap pandangan Hobbes dan Locke yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dijalankan lewat kekerasan atau kontrak sosial, kritik terhadap Marx dan Machiavelli yang melihat kekuasaan sebagai pertarungan kekuatan, kritik terhadap Freud dan Reich yang melihat kekuasaan sebagai represi yang menekan (Dosi, 2012: 29). Karena itu, bagi Foucault, kekuasaan tidak dilokalisasi karena ia tidak bertumpu pada negara, partai politik, dan ketokohan.

Dalam terang Foucault, strategi kekuasaan beroperasi di mana-mana melalui susunan, aturan-aturan, sistem sosial tertentu dalam masyarakat. Sistem sosial itu dapat ditemukan di mana-mana. Foucault melihat bahwa kuasa tidak melekat dalam subjek maupun struktur sosial, kuasa bukanlah sebuah fungsi kesadaran, tetapi eksis pada saat dijalankan. Karena itu, bagi Foucault kuasa tidak dimiliki karena tidak melekat dalam aktor tertentu, melainkan pada tindakan yang mengekspresikan kuasa itu sendiri (Hutagalung, 2004: 6).

Dengan demikian, Foucault menolak paradigma tradisional yang mengungkapkan bahwa kekuasaan identik dengan negara dan berlokasi pada apparatus pemerintah atau negara. Dengan kata lain, kekuasaan tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan menyebar di mana-mana.

4. Kekuasaan dan Pengetahuan

Kekuasaan dan pengetahuan mempunyai ikatan yang erat dalam pemikiran Foucault. Dalam bukunya *Arkeologi Pengetahuan*, Foucault mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan yang terjadi melalui wacana sosial (Dosi, 2012: 30—31). Karena itu, pemikiran Foucault terejawantahkan melalui wacana sosial yang dibuat. Artinya, kekuasaan terselenggara melalui terciptanya wacana sosial, bahkan inheren dan melekat dengan seluruh struktur wacana, sehingga dapat dikatakan suatu wacana selalu mengandung kekuasaan.

5. Kekuasaan dan Resistensi

Kekuasaan yang bersifat represif dan dominatif dalam banyak hal menimbulkan resistensi di mana saja dan kapan saja. Karena itu, Foucault menegaskan bahwa bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang represif dan dominatif itu juga bersifat pluralistik. Dalam pengertian, perlawanan terjadi dalam bentuk dan strategi yang beraneka ragam, bervariasi, dan dari individu atau kelompok masyarakat berbeda-beda yang merasa menjadi korban dari kekuasaan yang represif dan dominatif.

Karena kekuasaan merupakan sebuah praktik, maka kekuasaan memapankan relasi dan terorganisasi di antara sejumlah elemen dalam hubungan sosial. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mendisiplinkan tindakan seseorang sehingga berlangsung pada individu, tidak secara langsung, melalui struktur sosial dan pola-pola budaya (Dosi, 2012: 35).

Sejalan dengan itu, kekuasaan dipahami sebagai relasi atau sekumpulan relasi yang dikoordinasikan. Dhakidae (2003: 62—64) menerangkan konsep kekuasaan Foucault dalam beberapa pengertian: *Pertama*, kekuasaan berada di mana pun di sekujur tubuh sosial, sehingga tidak ada ruang yang tersisa bagi suatu kebebasan asali, di antara titik-titik saling sambung-menyambung antarjaringan kekuasaan. Karena itu, kekuasaan tidak total, tidak utuh-bulat, tetapi hadir di mana-mana. *Kedua*, kekuasaan jalin-menjalin antara kekuasaan

yang satu dengan kekuasaan yang lain seperti kekuasaan karena hubungan produksi, kekeluargaan, dan seksualitas. *Ketiga*, kekuasaan tidak semata-mata mengambil bentuk pelarangan dan penyiksaan (*prohibition and punishment*), akan tetapi dalam banyak bentuk, sama sekali bertentangan dengan homogenitas. *Keempat*, pola hubungan kekuasaan memberi keterangan tentang kondisi umum dominasi yang diorganisasikan ke dalam bentuk yang padu, strategis, dan tunggal. *Kelima*, hubungan kekuasaan melayani suatu kepentingan ekonomi, di mana ekonomi menjadi sesuatu yang strategis. *Keenam*, salah satu dimensi terpenting kekuasaan, yakni tidak ada hubungan kekuasaan tanpa perlawanan.

Mendeteksi poin yang terakhir, Foucault mengatakan bahwa *resistance*, perlawanan adalah bagian utuh dari kekuasaan, sesuatu yang lebih dilihat dari bawah, gerak dialektik. Selaras dengan itu, Dhakidae dalam bukunya *Menerjang Badai Kekuasaan* (2015) membahas paham kekuasaan di Indonesia menjadi tiga bagian penting. *Pertama*, kekuasaan kaum tak berkuasa (*powerfulness of the powerless*). *Kedua*, kekuasaan kaum terbuang (*power of the outcast*). *Ketiga*, ketidakkuasaan kaum berkuasa (*powerlessness of the powerful*). Pemetaan yang dibuat Dhakidae dalam bukunya, menjadi referensi penting bagi paham kekuasaan yang dipraktikkan di Indonesia.

Selain itu, tak dapat dimungkiri bahwa dalam praktiknya, kekuasaan menggunakan praktik represif dan secara halus menggunakan ideologi. Di sini, kekuasaan dengan sendirinya menciptakan hegemoni. Di mana ada kekuasaan, di situ ada hegemoni. Hegemoni merupakan suatu keadaan di mana manusia hidup

dalam ketidaksadaran. Manusia menjadi tidak sadar bahwa apa yang dipikirkannya, dirasakannya, dan dipraktikkannya telah dikontrol oleh kekuatan hegemoni (Salam, 2020: 194).

Dengan demikian, kekuasaan bisa dijalankan oleh aktor mana saja dan dengan sendirinya menciptakan hegemoni. Untuk kelas atas atau yang berkuasa, kekuasaan dan hegemoni digunakan untuk melanggengkan dominasi, sementara bagi kelas bawah atau yang dikuasai, kekuasaan dan hegemoni adalah perlawanan terhadap otoritas dan praktik dominasi (Hutagalung, 2004: 16).

2.5. Ideologi

Penjelasan tentang ideologi sudah sedikit disinggung ketika membahas paradigma wacana kritis pada subbab 2.3. Cakupan kajian mengenai ideologi memiliki wilayah garapan yang sangat luas. Thompson dalam Dosi (2012: 53) mengemukakan bahwa mengkaji ideologi berarti mengkaji tentang cara-cara pemaknaan yang berfungsi membentuk dan mempertahankan hubungan dominasi. Bahkan dapat dikatakan ideologi bertaut dengan seluruh aspek kehidupan manusia.

Antoine Destutt de Tracy (1754—1836) merupakan figur yang pertama kali memperkenalkan istilah ideologi dan mencoba menggarapnya secara sistematis. De Tracy memandang ideologi sebagai ilmu tentang ide, sehingga ideologi dalam perspektif de Tracy adalah cabang ilmu yang netral. Ideologi kemudian memiliki konotasi negatif ketika Napoleon kecewa dengan perlakuan teman-

temannya yang tidak sepakat dengan tindakan lalimnya selama ia menguasai Prancis.

Napoleon mencap mereka sebagai kaum “*ideologues*”, yakni segelintir intelektual yang doktriner dan tidak realistis. Di sini, terdapat pemahaman bahwa ideologi diterapkan kepada mereka yang menempatkan tujuan-tujuan yang ideal tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Makna ideologi kemudian mengalami pergeseran lagi saat Marx menyusun konsep komprehensifnya tentang pertarungan kelas, dan menempatkan ideologi sebagai kesadaran palsu. Marx melihat bahwa pengaruh sosial menyebabkan manusia menyerap informasi yang salah tentang realitas (Dosi, 2012: 55).

Sementara Gramsci melihat bahwa penindasan terhadap satu pihak oleh pihak lain tidak melulu berbentuk penindasan fisik atau penguasaan di bidang ekonomi, tetapi juga melalui pendekatan persuasif melalui berbagai wacana. Kondisi tersebut dinamakan Gramsci sebagai hegemoni, artinya hegemoni dipakai sebagai pengganti istilah ideologi. Lebih radikal, Gramsci memahami hegemoni sebagai sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, di mana di dalamnya konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; ideologi mendikte seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Ideologi juga bisa dipahami sebagai reaksi terhadap suatu dominasi. Setiap pemindasan akan menghasilkan suatu usaha dari pihak yang tertindas untuk melepaskan diri. Salah satu alat yang penting dalam upaya pembebasan ini ialah ideologi, di mana ideologi menjadi sebuah kepercayaan yang dibangun untuk menggerakkan kelompok yang tertindas. Saat pihak yang tertindas berhasil bebas dan berkuasa, ideologi bisa saja digunakan lagi untuk menindas pihak yang lebih lemah. Dalam banyak hal ideologi diproduksi melalui wacana yang memuat pengetahuan yang dilatarbelakangi oleh beragam kepentingan kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, ideologi sebenarnya berkorelasi dengan praktik-praktik diskursif dalam masyarakat, di mana kekuasaan berlangsung bersamaan dengan penciptaan kebenaran.

2.5.1 Ideologi Menurut van Dijk

Selain menjadi alat kepentingan yang berujung pada pelestarian suatu dominasi, wacana juga memengaruhi beragam representasi dalam masyarakat. Van Dijk dalam Dosi (2012: 61) menjelaskan bahwa cara membahas pertanyaan dan dimensi ideologi dilakukan dengan berfokus pada peranan wacana dalam proses produksi suatu dominasi, dengan tetap memperhatikan tantangan bagi dominasi tersebut.

Van Dijk membeberkan koherensi antara ideologi, masyarakat, dan wacana dalam beberapa sudut pandang (Dosi, 2012: 61), yaitu: *Pertama*, ideologi dipelajari dalam pengertian kognisi sosial. *Kedua*, tidak hanya dalam

pengertian kognisi sosial, tetapi juga dipahami dalam pengertian sosial politik, budaya, dan historis. *Ketiga*, ideologi dibentuk, diubah, dan direproduksi melalui wacana dan komunikasi. Keterkaitan antara ketiga sudut pandang tersebut terletak pada keharusan wacana dihubungkan secara eksplisit dengan struktur dan strategi personal dan pikiran masyarakat selaras dengan situasi sosial, interaksi sosial, dan struktur sosial masyarakat. Dengan cara serupa, kognisi mesti dihubungkan dengan wacana dan kondisi masyarakat.

Bagi van Dijk dalam Dosi (2012: 62), wacana atau reproduksi suatu ideologi bisa terjadi dalam beberapa dimensi, yakni: *Pertama*, dimensi sistem-kegiatan atau tindakan. *Kedua*, dimensi tindakan-sistem. *Ketiga*, dimensi kelompok-anggota. *Keempat*, dimensi anggota-kelompok. *Kelima*, dimensi lokal-global. Dimensi ini berupa suatu generalisasi, pengembangan, menyusun konteks kembali dari sebuah pengalaman dan pendapat untuk konsep yang abstrak dan sama.

Sesuai penjelasan di atas—dalam penelitian ini—dapat dikatakan adanya kaitan antara ideologi dominasi dan novel, di mana novel bisa menjadi instrument efektif-efisien guna mendistribusikan wacana dominan dan menginternalisasikannya ke dalam benak masyarakat, atau bisa juga sebaliknya: menjadi alat penolakan atau perlawanan terhadap dominasi kelompok dominan dengan memproduksi wacana yang bisa menggerakkan semangat perlawanan.